**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Pada tanggal 17 April tahun 2019 yang lalu terjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia untuk menentukan masa depannya lima tahun ke depan. Peristiwa tersebut biasa disebut dengan Pemilu, yang bertujuan untuk memilih para calon wakil rakyat di tingkat pusat maupun daerah.

Pemilu yang dilakukan secara rutin lima tahun sekali ini ditandai dengan banyak munculnya partai poltik. Partai politik dengan visi, misi, dan ideologi berlomba-lomba untuk tampil di depan publik untuk merebut hati para konstituennya. Atas dasar tujuan ini partai politik harus memiliki strategi komunikasi politik guna membentuk pencitraan positif partai agar dapat bersaing dengan partai-partai lain.

Strategi dalam menghadapi Pemilu Legislatif merupakan perencanaan yang cermat yang dilaksanakan dan disusun oleh tim kampanye yang memiliki tujuan mencapai kemenangan atas sasaran yang ditentukan dalam Pemilu. Sasaran merupakan apa yang ingin dicapai oleh tim kampanye dalam hal ini adalah target dukungan pemilihan yang diwujudkan dalam pemberian suara kepada partai politik tersebut. Ruang lingkup pembahasan strategi tak sebatas pada tatanan rencana atau konsep, namun yang terpenting adalah bagaimana tim kampanye tersebut mengimplementasikannya di lapangan.

Menurut Hafied Cangara (2014:13-14) terminologi komunikasi berasal dari bahasa Latin yakni *Communico* yang artinya membagi, dan *Communis* yang berarti membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Sebagai ilmu yang multidisiplin, definisi komunikasi telah banyak dibuat oleh para pakar dari berbagai disiplin ilmu. Menurut catatan Dance dan Larson dalam Miller sampai tahun 1976 sudah ada 126 definisi komunikasi. Ada definisi yang dibuat menurut perspektif sosiologi, budaya, *engineering*, ekonomi, dan ada pula dari perspektif ilmu politik. Meski definisi yang dibuat para pakar memiliki perspektif yang berbeda satu sama lainnya menurut latar belakang disiplin ilmu yang membuat definisi itu, namun pada dasarnya definisi-definisi tersebut tidak terlepas dari substansi komunikasi itu sendiri.

Menurut Dan Nimmo (2005:8) politik, seperti komunikasi, adalah proses, dan seperti komunikasi, politik melibatkan pembicaraan. Ini bukan pembicaraan dalam arti sempit seperti kata yang diucapkan, melainkan pembicaraan dalam arti yang lebih inklusif, yang berarti segala cara orang bertukar simbol, kata-kata yang dituliskan dan diucapkan, gambar, gerakan, sikap tubuh, perangai, dan pakaian. Ilmuwan politik Mark Roelofs mengatakan dengan cara sederhana, “Politik adalah pembicaraan, atau lebih tepat, kegiatan politik (berpolitik) adalah berbicara”. Ia menekankan bahwa politik tidak hanya pembicaraan, juga tidak semua pembicaraan adalah politik. Akan tetapi, “hakikat pengalaman politik, dan bukan hanya kondisi dasarnya, ialah bahwa ia adalah kegiatan berkomunikasi antara orang-orang”.

Menurut Miftah Thoha (2014:113) dahulu di awal kemerdekaan setelah maklumat wakil presiden dengan memberikan kebebasan rakyat mendirikan partai politik, maka direncanakan pula akan diselenggarakan pemilihan umum. Namun karena situasi keamanan dan stabilitas pemerintahan belum memungkinkan, maka baru 10 tahun setelah kemerdekaan di tahun 1955 Pemilu pertama diselenggarakan. Konsekuensi dari berdirinya banyak partai politik di dalam negara demokrasi maka pada tahun 1955 di bawah pimpinan Kabinet Burhanuddin Harahap diselenggarakan pemilihan umum. Waktu itu pemilihan dilakukan dua kali, pertama dilakukan pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan kedua pemilihan bagi anggota Dewan Konstituante.

Menurut Tim Litbang Kompas (2004:252) pada pemilu 1955, NU meraih 18,4 persen suara dan muncul sebagai partai politik ketiga terbesar setelah PNI dan Masyumi. Selanjutnya, dalam Pemilu 1971, yang diikuti oleh 10 partai, NU berhasil menempatkan diri di urutan kedua terbesar setelah Golkar dengan mengantongi suara 18,7 persen. Perolehan suara ini terbilang cukup sukses, mengingat saat itu perjuangan politik NU berada ditengah kuatnya intimidasi dari penguasa terhadap warga NU untuk memilih Golkar.

Sadar bahwa jalur politik merupakan cara untuk dapat menguasai dan mengendalikan pemerintah, maka penguasa orde baru melakukan penyederhanaan partai politik peserta pemilu. Fusi partai politik dari peserta Pemilu 1971, kecuali Golkar, dilakukan pada tanggal 5 Januari 1973. Partai Persatuan Pembangunan Pembangunan (PPP) lalu terbentuk, sebagai fusi dari Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Selain PPP, tanggal 10 Januari 1973 juga muncul nama PDI yang merupakan fusi dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, dan Murba. Fusi yang lebih tepat disebut sebagai trik Orde Baru untuk mengusai politik, lambat laun meredam aktivitas NU di bidang politik.

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto akhirnya menyatakan mundur sebagai presiden, akibat demonstrasi dan desakan berbagai kalangan agar Soeharto mengundurkan diri. Desakan arus reformasi ini telah membawa perubahan yang cukup besar bagi dunia politik bangsa, khususnya NU. Tanggal 23 Juli 1998 menjadi tanggal bersejarah bagi NU, sebagai awal kebangkitan NU dalam kancah politik Indonesia, yakni dengan berdirinya partai politik yang bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka, dan demokratis yang diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa.

Selanjutnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) harus siap menghadapi Pemilu 1999 yang tidak jauh berbeda dari dua pemilu pertama, 1955 dan 1971. PKB yang mengandalkan basis dukungan dari Nahdliyin ini akhirnya mampu menempatkan diri pada posisi ketiga dengan meraih suara 12,6 persen pada Pemilu 1999. Dengan persiapan yang mendesak, sekitar satu tahun, PKB berhasil membangun kembali kepercayaan dirinya dalam bidang politik yang sudah terpasung selama Orde Baru. Pada periode 1999-2004 PKB berhasil pula menempatkan wakilnya sebanyak 51 orang di DPR. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan ulama-ulama NU.

Modal dasar yang dimiliki PKB berupa massa pendukung setia, memaksa segenap pengurus PKB khususnya di Kota Jambi, harus piawai dalam mengemudikan kendaraan politik NU ini. Aspirasi warga NU senantiasa harus dinomorsatukan. Cara ini dapat disebut sebagai salah satu cara memperkuat jaringan dan menumbuhkan pendukung partai yang militan.

Di Kota Jambi banyak berdiri partai yang berbasis massa Islam, meskipun demikian PKB tetap berjuang keras dalam merebut simpati umat Islam, ini dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan oleh PKB Kota Jambi yang selalu berpihak dan perhatian kepada kepentingan umat Islam di Kota Jambi. Inilah yang membuat keberadaan PKB Kota Jambi masih tetap terjaga.

Berdasarkan hasil pemilu yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk tingkat nasional, pada Pemilu 2009 PKB meraih 5.146.122 suara (4,94%). Pada Pemilu 2014 PKB meraih 11.298.957 suara (9,04%), dan pada Pemilu 2019 memperoleh suara 13.570.097 (9,69%).Kenaikan perolehan suara ini justru berbanding terbalik dengan yang terjadi di Kota Jambi, yang dimana perolehan suaranya justru mengalami penurunan.

Berikut tabel perolehan suara pada Pemilu Legislatif 2014 dan 2019 di tingkat nasional:

**Tabel 1.1 Perolehan Suara pada Pemilu 2014 dan 2019 di Tingkat Nasional**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Partai Politik | PEMILU LEGISLATIF 2014 | | | PEMILU LEGISLATIF 2019 | | |
| Perolehan Suara | Persentase | Peringkat | Perolehan Suara | Persentas | Peringkat |
| 1 | PKB | 11.298.957 | 9,04% | 5 | 13.570.097 | 9,69% | 4 |
| 2 | Gerindra | 14.760.371 | 11,81% | 3 | 17.594.839 | 12,57% | 2 |
| 3 | PDIP | 23.681.471 | 18,95% | 1 | 27.053.961 | 19,33% | 1 |
| 4 | Golkar | 18.432.312 | 14,75% | 2 | 17.229.789 | 12,31% | 3 |
| 5 | Nasdem | 8.402.812 | 6,72% | 8 | 12.661.792 | 9,05% | 5 |
| 6 | Garuda | - | - | - | 702.536 | 0,52% | 15 |
| 7 | Berkarya | - | - | - | 2.929.495 | 2,09% | 11 |
| 8 | PKS | 8.480.204 | 6,79% | 7 | 11.493.663 | 8,21% | 6 |
| 9 | Perindo | - | - | - | 3.738.320 | 2,67% | 10 |
| 10 | PPP | 8.157.488 | 6,53% | 9 | 6.323.147 | 4,52% | 9 |
| 11 | PSI | - | - | - | 2.650.361 | 1,89% | 12 |
| 12 | PAN | 9.481.621 | 7,57% | 6 | 9.572.623 | 6,84% | 8 |
| 13 | Hanura | 6.579.498 | 5,26% | 10 | 2.161.507 | 1,54% | 13 |
| 14 | Demokrat | 12.728.913 | 10,19% | 4 | 10.876.507 | 7,77% | 7 |
| 15 | PBB | 1.825.750 | 1,46% | 11 | 1.099.848 | 0,79% | 14 |
| 16 | PKPI | 1.143.094 | 0,91% | 12 | 312.775 | 0,22% | 16 |
|  | Jumlah | 124.972.491 | 100% |  | 158.012.506 | 100% |  |

*Sumber: Komisi Pemilihan Umum*

Sedangkan untuk tingkat Kota Jambi, pada Pemilu 2014 PKB meraih 15.306 suara (5,43%), dan pada Pemilu 2019 perolehan suara PKB Kota Jambi turun menjadi 14.456 (4,48%).Penurunan perolehan suara ini menyebabkan turunnya peringkat PKB Kota Jambi dari yang sebelumnya (Pemilu Legislatif 2014) menduduki peringkat 9 serta mendapatkan 4 kursi dan bisa membentuk fraksi, akan tetapi pada Pemilu Legislatif 2019 ini posisi PKB Kota Jambi turun menjadi peringkat 10 dengan mendapatkan 3 kursi saja.

Berikut tabel perolehan suara pada Pemilu Legislatif 2014 dan 2019 di Kota Jambi:

**Tabel 1.2 Perolehan Suara pada Pemilu 2014 dan 2019 di Kota Jambi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Partai Politik | PEMILU LEGISLATIF 2014 | | | PEMILU LEGISLATIF 2019 | | |
| Perolehan Suara | Persentase | Peringkat | Perolehan Suara | Persentase | Peringkat |
| 1 | PKB | 15.306 | 5,43% | 9 | 14.456 | 4,48% | 10 |
| 2 | Gerindra | 34.514 | 12,24% | 3 | 46.080 | 14,29% | 1 |
| 3 | PDIP | 47.754 | 16,94% | 2 | 36.359 | 11,28% | 2 |
| 4 | Golkar | 24.315 | 8,63% | 4 | 34.054 | 10,56% | 4 |
| 5 | Nasdem | 15.716 | 5,58% | 7 | 29.566 | 9,17% | 5 |
| 6 | Garuda | - | - | - | 3.114 | 0,97% | 16 |
| 7 | Berkarya | - | - | - | 9.533 | 2,96% | 13 |
| 8 | PKS | 13.435 | 4,77% | 8 | 29.298 | 9,09% | 6 |
| 9 | Perindo | - | - | - | 10.399 | 3,22% | 12 |
| 10 | PPP | 15.270 | 5,42% | 10 | 14.735 | 4,57% | 8 |
| 11 | PSI | - | - | - | 4.262 | 1,32% | 14 |
| 12 | PAN | 26,221 | 9,30% | 5 | 25.508 | 7,91% | 7 |
| 13 | Hanura | 18.155 | 6,44% | 6 | 14.703 | 4,56% | 9 |
| 14 | Demokrat | 57.057 | 20,24% | 1 | 35.011 | 10,86% | 3 |
| 15 | PBB | 7.889 | 2,80% | 11 | 11.416 | 3,54% | 11 |
| 16 | PKPI | 6.249 | 2,22% | 12 | 3.971 | 1,23% | 15 |
|  | Jumlah | 281.881 | 100% |  | 322.465 | 100% |  |

*Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi*

Tentunya ada masalah yang terjadi, sehingga terjadi penurunan pada perolehan suara PKB Kota Jambi yang justru berkebalikan dengan kenaikan suara PKB di tingkat nasional. Masalah inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Peneliti ingin mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja dari strategi komunikasi politik yang digunakan PKB Kota Jambi sehingga terjadi penurunan perolehan suara pada Pemilu 2019.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**Faktor Penyebab Penurunan Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kota Jambi**”

* 1. **Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah pada masalah-masalah yang terjadi pada strategi komunikasi politik yang digunakan oleh PKB Kota Jambi pada Pemilu Legislatif 2019.

* 1. **Rumusan Masalah**

Berkenaan dengan uraian di atas yang menunjukkan bahwa penurunan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa, dengan ini peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bagaimana strategi komunikasi politik yang digunakan oleh PKB Kota Jambi pada Pemilu Legislatif 2019?

b. Apa saja kelebihan dan kelemahan strategi komunikasi politik yang digunakan oleh PKB Kota Jambi pada Pemilu Legislatif 2019?

c. Apa penyebab turunnya perolehan suara PKB Kota Jambi pada Pemilu Legislatif 2019?

* 1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini bisa dirumuskan sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui strategi komunikasi politik PKB Kota Jambi pada Pemilu Legislatif 2019.

b. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan strategi komunikasi politik yang digunakan oleh PKB Kota Jambi pada Pemilu Legislatif 2019.

c. Untuk mengetahui penyebab turunnya perolehan suara PKB Kota Jambi pada Pemilu Legislatif 2019.

* 1. **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian yang direncanakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wahana penerapan ilmu dan teori tentang ilmu politik yang diperoleh di bangku kuliah, serta sebagai tambahan pengetahuan untuk bekal di masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada partai politik tentang cara yang bijaksana dalam menerapkan strategi komunikasi politik kepada pengurus, kader, simpatisan, maupun masyarakat, sehingga dapat memperbesar perolehan suara pada pemilu yang akan datang.

* 1. **Definisi Istilah**

Berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Partai Politik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1, tentang Partai Politik, yang menyebutkan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilihan Umum

Menurut Muhadam Labolo (2015:51) pemilu merupakan suatu arena kompetisi. Menang atau kalahnya suatu kandidat akan ditentukan oleh rakyat dengan menggunakan mekanisme pemungutan suara. Menentukan pilihan dalam pemilu merupakan hak setiap warga negara. Sebagai instrumen yang sangat terpenting dalam rangka untuk memilih dan ikut menentukan para wakil sekaligus pemimpin rakyat yang akan duduk dalam pemerintahan, pemilu memberikan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah yang benar-benar dianggap mampu untuk mengaspirasikan kehendak mereka.

1. Komunikasi Politik

Menurut Hafied Cangara (2009:36) komunikasi politik adalah suatu proses komunikasi yang memiliki implikasi atau konsekuensi terhadap aktifitas politik. Faktor ini pula yang membedakan dengan disiplin komunikasi lainnya seperti komunikasi pembangunan, komunikasi pendidikan, komunikasi bisnis, komunikasi antar budaya, komunikasi organisasi, komunikasi keluarga, dan lain semacamnya. Perbedaan itu terletak pada isi pesan. Artinya komunikasi politik memiliki pesan yang bermuatan politik, sementara komunikasi pendidikan memiliki pesan yang bermuatan masalah-masalah pendidikan. Jadi untuk membedakan antara satu disiplin dengan disiplin lainnya dalam studi ilmu komunikasi, terletak pada sifat dan isi pesannya.